

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Isu *comfort women* merupakan hambatan dalam hubungan bilateral Jepang dengan Republik Korea sejak kemunculannya pada tahun 1992. Jepang sebagai negara yang dituntut pertanggung jawabannya oleh Republik Korea atas persoalan ini, telah melakukan beberapa upaya sejak tahun 1992, di antaranya; mengeluarkan permintaan maaf resmi dari pemerintah yang dikenal dengan Kono Statement, Murayama Statement hingga menyalurkan bantuan finansial melalui sebuah badan dana Asian Women Fund (AWF) yang mana upaya tersebut terhenti pada tahun 2007.

Dinamika isu ini terus mengalami naik turun hingga tahun 2015 saat Jepang mengambil langkah kebijakan penyelesaian isu ini yang melahirkan *Agreement 28 December 2015*. Kebijakan ini dihasilkan pada masa pemerintahan Shinzo Abe yang mulai menjabat Perdana Menteri Jepang sejak tahun 2013. Dalam *agreement* ini, kedua negara bersepakat untuk menyelesaikan isu *comfort women*. Jepang sebagai negara yang menginisiasi *Agreement* ini dinilai mengambil sikap yang tiba-tiba tidak sesuai dengan sikap yang dipegangnya selama ini terhadap isu *comfort women*, terutama di masa pemerintahan Abe.

Dalam penelitian ini, peneliti coba menganalisis bagaimana kebijakan tersebut bisa muncul; apa saja yang mempengaruhi Jepang untuk mengambil langkah tersebut dalam batasan waktu 2013 – 2015. Peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh William Coplin. Dalam teorinya Coplin berpendapat, tindakan

negara yang terwujud dalam sebuah kebijakan luar negeri merupakan akibat dari interaksi tiga determinan yang mempengaruhi pembuat kebijakan; (1) kondisi politik dalam negeri, (2) kondisi ekonomi dan militer, dan (3) konteks internasional. Kondisi politik dalam negeri yang dimaksud Coplin adalah hubungan antara para pengambil keputusan kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri. Aktor-aktor politik itu disebut dengan *policy influencers* yang terdiri dari *policy influencers*; *bureaucratic influencers*, *partisan influencers*, *interest influencers*, dan *mass influencers*.

Dari analisis yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa politik dalam negeri tidak mendorong Jepang mengambil kebijakan ini, namun pada sisi *bureaucratic influencer* mempengaruhi proses perumusan bentuk *agreement* yang dilakukan oleh MoFA. Kondisi ekonomi dan militer Jepang, dinilai lebih memberi pengaruh karena peneliti melihat kedua kondisi ini dalam kaitannya dengan kerjasama antara kedua negara. Berkurangnya nilai Jepang dari sisi ekonomi Republik Korea menyebabkan Republik Korea semakin percaya diri dalam menekan Jepang. Dari segi kondisi militer, Jepang menyadari pentingnya memperkuat kerjasama dengan Republik Korea sebagai satu-satunya mitra strategis di kawasan untuk mengatasi ancaman regional.

Peneliti menilai, di antara ketiga determinan tersebut, konteks internasional lah yang memberikan dorongan paling besar hingga Jepang mengambil langkah kebijakan menginisiasi pembentukan *Agreement 28 December 2015*. Republik Korea yang semakin menegaskan sikapnya mengenai betapa pentingnya bagi Jepang untuk menyelesaikan persoalan ini untuk membangun hubungan kerjasama yang baik, memberikan tekanan kepada Jepang. Hal tersebut semakin diperkuat dengan

pengaruh Amerika Serikat sebagai aliansi utama kedua negara yang mendorong Jepang untuk segera menyelesaikan isu ini demi kerjasama strategis antara ketiganya.

5.2 Saran

Isu *comfort women* hingga saat ini masih menjadi persoalan bagi kedua negara meskipun telah ada *Agreement 28 December 2015*. Hal ini tentu menarik untuk diteliti; apa yang menyebabkan isu ini begitu berlarut-larut bagi kedua negara. Peneliti juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menganalisis isu *comfort women* ini dengan teori yang berbeda agar semakin kaya penelitian mengenai isu ini.

Penelitian ini memiliki banyak kekurangan di berbagai sisi, akibat minimnya data yang mampu didapatkan melalui kajian pustaka. Peneliti berharap kekurangan-kekurangan tersebut di kemudian hari dilengkapi oleh penelitian-penelitian selanjutnya namun meskipun begitu, semoga penelitian ini mampu memberi sumbangsih dalam penelitian mengenai Kebijakan Luar Negeri di masa mendatang.

